

**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN SEPARATISME DI INDONESIA
(STUDI KASUS PENANGANAN SEPARATISME DI PAPUA)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember**



OLEH :

MAHESA NOVARIO IRAWAN

NIM : 1510111042

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

2019

PENGESAHAN

Tinjauan Yuridis Penanganan Separatisme Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Separatisme Di Papua)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari :

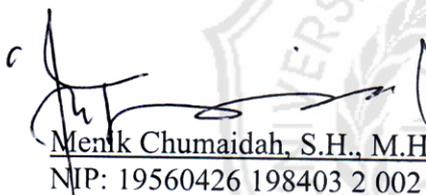
Tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji

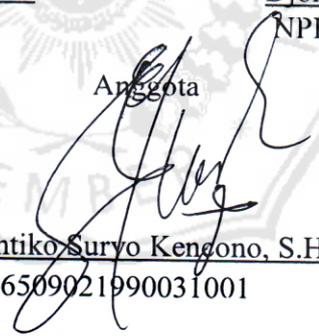
Ketua

Sekretaris


Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.
NIP: 19560426 198403 2 002


Djoko Purwanto, S.H., M.Hum
NPK: 88 03 191

Anggota


Pramukhtiko Suryo Kengono, S.H., M.H.
NIP: 196509021990031001

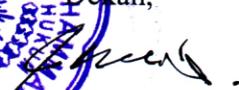
Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 88 09 225

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT sehingga Tidak ada kata yang lebih tepat untuk diucapkan setelah selesainya skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Penanganan Separatisme Di Indonesia (Studi Kasus Penanganan Separatisme Di Papua).**

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas khir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak. Olehkarenaitu ,sayamengucapkanterimakasihkepada :

1. **H. Suyatna, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah member izin dan kesempatan gunamenyelesaikan skripsi ini
2. **Pramukhtiko Suryo Kencono, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir.
3. Almarhumah Ibu Sri Praptianingsih, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penulisan Hukum yang sudah memberikan inspirasi pembuatan judul

penelitian ini dan tidak lelah dalam memotivasi serta membimbing saya.

4. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya dari awal saya menimba ilmu di sini, juga kepada staf dan karyawan pengajaran di Fakultas Hukum saya ucapkan terimakasih telah banyak membantu.
5. Orang tua, kakak, dan seluruh keluarga saya atas cinta dan doa yang selalu diberikan sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
6. Teman-teman mahasiswa seperjuangan, dan semua pihak yang membantu, mendoakan serta atas perhatiannya semoga kita tetap menjalin serta menjaga silaturrokhim diantara kita semua, amin;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang diberikan kepada penulis. Akhir kata. Saya menyadari dalam skripsi ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan demi perbaikankedepannya. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Penulis, 01 Agustus 2019

Mahesa Novario Irawan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
II. KAJIAN TEORI	10
2.1. Konsep Dasar Wewenang	10
2.2. Pengertian Separatisme	12
2.3. Deskripsi Gerakan Separatisme dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).....	13
2.4 Implikasi Separatisme	14
2.5 Karakteristik Separatisme	17
2.6 Kualifikasi Separatis	17
2.7 Separatis Menurut Aspek Pidana	18
2.8 Kualifikasi Kriminal Bersenjata	19
2.9 Deskripsi Organisasi Papua Merdeka (OPM)	20

2.10 Asal Usul Organisasi Papua Merdeka (OPM).....	21
2.11 Penyebab Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).....	26
2.12 Eksistensi Gerakan Bersenjata	30
2.13 Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang (Kepolisian Negara Republik Indonesia)	32
2.13 Tugas Dan Wewenang Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia....	35
2.14 Tugas Dan Wewenang Badan Intelijen Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.....	36
III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
3.1 Sejarah Singkat Gerakan Beberapa Partai Organisasi Papua Merdeka ...	38
3.2 Dasar Kewenangan Penanganan Separatisme Di Indonesia	41
IV.PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	52
V. DAFTAR PUSTAKA	53